

Kajian Perencanaan Penataan Daya Tarik Wisata Pelabuhan Buleleng

Oleh

I Putu Gede Parma, S.St.Par

**(Diterbitkan pada Jurnal Media Komunikasi FIS Universitas Pendidikan
Ganesha Edisi Khusus D3 Perhotelan Vol.10, No.2 Desember 2011 ISSN
1412-8683, Halaman: 52-65)**

Abstrak

Kajian mengenai perencanaan penataan daya tarik wisata Pelabuhan Buleleng, sudah menjadi agenda besar pemerintah Kabupaten Buleleng. Namun dalam perjalanannya perencanaan belum sesuai dengan pelaksanaannya, karena mendapat respon yang kurang maksimal dari berbagai pihak. Ada yang menilai proyek atau rencana pengembangan Pelabuhan Buleleng tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang ada disekitar kawasan, dimana nantinya berbagai ekosistem dan lingkungan sosial yang ada disekitar kawasan akan terganggu.

Persoalan lain yang muncul adalah masih belum adanya investor yang benar-benar mau untuk menginvestasikan dananya secara maksimal guna membangun kawasan tersebut. Sehingga sampai saatini rencana pemerintah daerah tersebut belum dapat terealisasi. Dengan demikian perlu hendaknya dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap rencana ini dengan melibatkan semua unsur (elemen-elemen) yang ada dalam masyarakat.

Kata Kunci : Penataan, Daya Tarik Wisata, Pelabuhan Buleleng

Abstract

The study of tourism attraction arrangement planning of Buleleng port had become a big agenda of Buleleng regency. However, it process had not yet in accordance withits implementation, because it was responced unproperley by variouse parties. According to some people, the Buleleng Harbour project was considered to emerge some seriouse environmental problems so the surrondings, in which in the future variety of ecosystems and social environments that exist around the region will be disrupted.

Another emerge issues is the inexistence of investors who really want to optimally invest the harbour. Therefore, the plan of local government not yet be realized for the moment. Thus, there should be a more in-depth study of this plan by involving all elements that exist in society.

Keywords: Settlement, Tourist Attractions, Harbor Buleleng

1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam menyukseskan agenda reformasi nasional. Dalam konteks ini sangat dituntut kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Keberadaan investor untuk pembangunan wilayah adalah suatu hal yang sangat mutlak saat sekarang ini, jika kita tidak ingin tertinggal dari daerah-daerah lainnya, apalagi jika dihubungkan dengan konsep tingkat pertumbuhan ekonomi yang hendak kita capai.

Di masa lalu tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi sangat ditopang oleh *Government Expenditure*, tetapi untuk masa sekarang seiring dengan semakin terbatasnya anggaran pemerintah, maka tingkat pertumbuhan ekonomi sangat diharapkan dari investasi. Apalagi setiap kegiatan investasi selalu membawa *Multiplier Effect* yang sangat besar, diantaranya terhadap penyediaan lapangan kerja baru, pencerahan terhadap perkembangan industri rumah tangga (meningkatnya produksi kerajinan tangan, makanan, produksi spesifik/ khas masyarakat lokal), serta berkembangnya sektor-sektor penunjang pariwisata dan perdagangan lainnya.

Kondisi ini tentunya akan menimbulkan persaingan positif dari setiap Pemerintah Daerah untuk menggaet investor sebanyak-banyaknya ke daerah masing-masing. Daerah yang lebih siap dan mempunyai *competitive advantage* yang akan memenangkan persaingan ini. Daerah yang masih mempersulit urusan dengan investor, serta memiliki birokrasi yang berbelit-belit dan mahal pasti akan ditinggalkan investor.

Berkenaan dengan itu Pemerintah Kabupaten Buleleng mempunyai kebijakan yang memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi, dan sekaligus juga memberikan berbagai informasi tentang potensi dan peluang berinvestasi di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng serta Provinsi Bali mempunyai peranan penting dalam sejarah Republik Indonesia dari zaman perjuangan hingga kemerdekaan, dahulu wilayah Buleleng merupakan ibu kota dari Sunda Kecil yang membawahi wilayah kekuasaan hingga kawasan timur Indonesia. Kawasan untuk pembangunan Negara serta modernisasi wilayah dengan memperhatikan lingkungan dalam hal ini sangatlah penting. Dewasa ini, Kabupaten Buleleng memiliki visi pembangunan pesisir. Perkembangan jumlah dan sebaran penduduk yang berlangsung selama masa kemerdekaan membawa implikasi terhadap perkembangan fisik kota, terutama ke arah barat dan timur. Pemerintah dan masyarakat menghadapi beberapa masalah di dalam perencanaan rencana pembangunan kota sehingga relatif banyak bagian-bagian kota yang terbangun belum sesuai dengan peruntukkan tanah yang ditetapkan di dalam rencana kota. Pengembangan ruang kota berdasarkan fungsi masing-masing kawasan pengembangan terus diupayakan oleh pemerintah, diantaranya pengembangan Pelabuhan Buleleng.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Buleleng sebagai salah satu pusat perekonomian dan pintu gerbang perdagangan penting di Indonesia Bagian Timur serta yang tertuang baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah dinyatakan bahwa Pelabuhan Buleleng akan dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Agar tidak membebani Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (APBD) maka pengembangan kawasan ini akan dilaksanakan melalui pendekatan *Public Participation Partnership (RPP)*. Ditinjau dari aspek *Cultural landscape* (warisan budaya kota – bentang budaya) dan *natural landscape* (geomorfologi Kawasan Pantai) maka kawasan ini tergolong *prime land* yang memiliki ruang yang sangat baik. Untuk itu perlu dilakukan pengenalan/promosi potensi-potensi pengembangan kawasan ini. Untuk menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan promosi tersebut, perlu dilakukan kajian-kajian yang memikirkan prinsip pembangunan ekonomi, sosial, dan

lingkungan hidup, yang semua terpadu menjadi prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian penataan kembali Pelabuhan Buleleng melalui pendekatan reklamasi menuntut investasi finansial yang besar juga memerlukan dukungan teknologi tinggi sehingga potensial menimbulkan dampak besar dan penting. Kajian dampak penataan hendaknya jangan hanya bertumpu semata-mata pada Amdal yang merupakan bagian dan perizinan.

Mengacu pada kondisi tersebut tentunya perlu dilakukan kajian dan perencanaan yang lebih komprehensif lagi, sehingga Rencana Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Buleleng dapat diwujudkan mengingat reklamasi merupakan gagasan untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melalui penerapan teknologi yang memerlukan investasi besar, dengan reklamasi tersebut nantinya kapal-kapal wisata bertonase besar akan dapat bersandar secara langsung atau paling tidak dalam posisi lego jangkar dapat lebih dekat ke bibir pantai. Investasi teknologi terhadap bantang alam di lokasi rencana akan mengakibatkan perubahan fisik lingkungan dan pada tingkat selanjutnya perubahan lingkungan tersebut akan menimbulkan lanjutan terhadap komponen lingkungan lainnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu dikaji secara cermat pertimbangan-pertimbangan pengambilan keputusan tiap-tiap kegiatan yang akan menjadi rangkaian kegiatan reklamasi tersebut secara hierarki, sejak tahap proyek-program-rencana-kebijakan. Apabila kegiatan reklamasi sebagai proyek fisik yang mencakup tahap perencanaan, prekonstruksi, tahap konstruksi dan tahap operasi/pasca konstruksi, maka perlu ditelaah rumusan pemikiran yang menjadi dasar pemilihan opsi reklamasi agar dapat dilakukan mitigasi dan optimasi. Di tingkat yang lebih tinggi perlu ditelusuri pokok-pokok pikiran perencanaan tahunan yang menjadi landasan program-program. Dengan demikian bagaimana rumusan kebijakan agar dapat dijamin kesinambungan rencana, program proyek dari tahun ke tahun.

2. Metode

Kajian Perencanaan Penataan Daya Tarik Wisata Pelabuhan Buleleng merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mewujudkan usaha tersebut.

Dalam pengumpulan data haruslah dipilih teknik yang paling tepat, sehingga akan diperoleh data yang valid dan reliabel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara ; (1) Wawancara mendalam (*dept interview*), metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan beberapa stakeholder seperti ; Kepala Tata Usaha Bappeda Kabupaten Buleleng, Kabag Penanaman Modal dan Kerjasama Setda Kabupaten Buleleng, Kabid Tata Ruang TRTB Kabupaten Buleleng, Kabid Bapedalda Kabupaten Buleleng dan Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng; (2) Pengamatan Intensif (observasi), pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi. Dengan cara ini interaksi yang terjadi dalam penelitian dapat direkam tanpa harus tergantung pada daya ingat peneliti. Observasi dilakukan terhadap beberapa faktor strategis yang relevan dengan permasalahan penelitian; dan (3) Dokumentasi (pemanfaatan data sekunder), teknik pengumpulan data yang tidak kalah pentingnya dari teknik sebelumnya, pemanfaatan dokumen-dokumen berupa RPJP, RPJM, RTRW Kabupaten Buleleng, Renstra, Rapertada, Propeda dan dokumen-dokumen lainnya. Selain itu data sekunder lain seperti studi pustaka adalah hal tidak mungkin diabaikan dalam penelitian ini.

Jenis data yang digunakan berupa data Primer dan Data Sekunder. Data Primer merupakan data dari hasil wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder merupakan data-data yang berupa dokumentasi, arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini. Adapun dalam teknik menganalisis data dilakukan dengan cara menginterpretasikan data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman intelektual dan empiris yang kemudian dikaji secara dalam sehingga menghasilkan gambaran dari data yang sesungguhnya. Analisis

dilakukan dengan menghubungkan dan disesuaikan dengan teori yang digunakan sehingga dapat dihasilkan kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

3. Kajian Teori

3.1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan tentang hari depan yang dikehendaki. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat diperlukan informasi yang relevan, dapat dipercaya dan tepat pada waktunya. Ketersediaan informasi menjadi semakin penting artinya di era informasi seperti sekarang ini, dimana segala sesuatunya berlangsung semakin cepat dan menjadi semakin kompleks. Dalam hubungannya dengan perencanaan pariwisata (*tourism planning*), ketersediaan informasi dari berbagai dimensi sangat diperlukan sebagai landasan pengambilan keputusan. Hal ini dimaksudkan agar rencana-rencana yang dibuat dapat diimplementasikan dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Salah satu sumber informasi yang dimaksud berasal dari hasil-hasil penelitian, di samping sumber-sumber informasi penting lainnya.

Perencanaan dapat didefinisikan juga sebagai suatu susunan sistematis tentang langkah atau tindakan yang dilaksanakan di masa depan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mencapai tujuan tertentu.

3.2. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan atas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk memajemen dalam usaha untuk mencapai sasaran, garis haluan. Perbedaan kebijakan dengan kebijaksanaan adalah kebijaksanaan merupakan kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman

dan pengetahuannya), kecakapan dalam bertindak apabila menghadapi masalah dan sebagainya. Dalam penulisan ini tidak dibedakan hal tersebut karena dianggap pengertian kebijakan sama atau tidak jauh berbeda dengan kebijaksanaan.

Pengertian kebijakan diungkap pula sebagai salah satu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu menurutnya suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi (Islamy, 2001:17).

Demikian pula James E. Anderson merumuskan arti kebijakan sebagai periaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu dalam mengatasi masalah atau persoalan tertentu (Wahab, 2001:2).

Dewasa ini kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya menurut Frederich, Carl dalam Wahab (2001:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang disusulkan oleh seseorang/kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mengatasi masalah dalam rangka untuk mencapai tujuan atau mewujudkan suatu maksud tertentu atau sasaran yang diinginkan.

Sementara itu Amir Santoso dalam Winarno (2007 : 3) mengkomparasikan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi dua. Pertama, menganggap kebijakan publik sama dengan tindakan-tindakan pemerintah. Mereka memandang kebijakan dalam tiga lingkungan yaitu sebagai proses perumusan kebijaksanaan, implmentasi dan evaluasi kebijakan. Kedua

menganggap kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi awal sebagai akibat yang diramalkan.

Kebijakan publik menitik beratkan pada apa yang oleh Dewey (1927) katakan sebagai “public dan problem-problemnya” (Parson, 2005: xi). Dewey memberikan batasan yang teramat luas tentang kebijakan publik. Berikut ini akan diberikan beberapa batasan kebijakan publik yang pernah dikemukakan dan terpublikasi dalam beberapa tulisan. Robert Eyestone (1971; 18) mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya (Winarno, 2007:17). Kemudian Winarno dalam halaman yang sama juga menukil Thomas R. Dye (1975:1) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Parson (2005; xi) mengemukakan pendapat bahwa kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu persoalan disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Lindbloom lebih menaruh perhatian pada proses kebijakan itu sendiri, dengan konsepnya yang *incrementalism*, memandang bahwa kebijakan itu *complexly interactive process without beginning or end* (Putra, 2001:12). Subarsono (2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu.

Kebijakan publik(*public policy*) merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan-badan dan pejabat daerah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertanian, energi dan kesehatan sampai pendidikan, kesejahteraan dan kejahatan. Pada salah satu isu bidang tersebut terdapat banyak isu kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan serangkaian arah tindakan pemerintah yang aktual maupun yang potensial yang mengandung konflik diantara segmen-segmen yang ada dalam masyarakat. Isu-isu kebijakan yang biasanya menyangkut hasil konflik didefinisikan mengenai masalah kebijakan.

Kebijakan diperlukan bagi suatu organisasi yang disebut dengan Negara. Ketika organisasi Negara tersebut terbentuk, maka Negara bersangkutan melalui

konstitusi mengatur tata kehidupan pemerintahan, Negara dan publik. Karena itu, sebuah kehidupan bersama perlu diatur sebaik dan seefektif mungkin dengan tujuan agar tiap individu dalam masyarakat tidak saling merugikan dan apabila ada yang dirugikan dan merasa keberatan maka harus diatur dalam suatu mekanisme yang disepakatai bersama sehingga tidak boleh ada yang mengambil langkah sendiri yang akan menyulut kekacauan dalam tatanan masyarakat. Hidup bersama harus diatur melalui peraturan Negara yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang didalamnya ada *rewarding* bagi yang mendukung aturan dan *punishment* bagi para pelanggarnya. Aturan tersebut secara sederhana dapat dikatakan sebagai kebijakan publik (Nugroho, 2003: 4-5).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disintesiskan sebuah batasan tentang kebijakan publik yaitu sejumlah produk dan aktivitas yang dikeluarkan dan dilakukan oleh pemegang otoritas publik untuk merespon permasalahan dan untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkup publik yang tertentu pula.

3.3. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Kota dan Kawasan Pantai

Kegiatan penataan Pelabuhan Buleleng merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral yang berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu sebagai bahan pertimbangan antara lain adalah;

- i. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; digunakan sebagai acuan penataan ruang.
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah; sebagai acuan pemanfaatan tanah hasil reklamasi.

Rumusan visi Kabupaten Buleleng yaitu terwujudnya masyarakat madaniyang berbasis pertanian, perdagangan dan jasa yang unggul dan berdyaa saing tinggi dalam kehidupan sosial yang tertib dan teratur. Agar seluruh stakeholder mendapat gambaran dan pemahaman yang sama, kata kunci di dalam rumusan tersebut adalah masyarakat madani, masyarakat madani sejahtera,

pertanian, perdagangan dan jasa, berdaya saing tinggi, kehidupan perkotaan, dan perkotaan yang tertib dan teratur.

Rekomendasi kebijakan jangka panjang memuat uraian tentang perspektif wilayah masa depan, kawasan pembangunan (meliputi kawasan barat, kawasan timur, kawasan utara, dan kawasan selatan), sektor unggulan, strategi dan prioritas pembangunan, agenda pembangunan daerah, dan indikator keberhasilan pembangunan.

Tentang perspektif daerah masa depan, dijelaskan bahwa wujud Kabupaten Buleleng masa depan dicirikan oleh kota Modern, nyaman dan aman karena pemerintah berwibawa, dunia usaha produktif dan komunitas yang peduli. Dalam konteks ini berkembang beberapa pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan sosial yang baru sebagai landasan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Tentang kawasan pembangunan, dijelaskan bahwa kriteria penetapan kawasan adalah kesamaan karakteristik, potensi pertumbuhan dan kesatuan teritorialnya. Kriteria penetapan tersebut juga mempertimbangkan tiga kategori kawasan, pertama kawasan pusat, peralihan dan pinggiran ke dua kawasan darat dan laut, ketiga kawasan maju dengan konsep konversi dan preservasi sebab pemanfaatan ruang intensitas tinggi dan kawasan tertinggal dengan konsep reservasi dan konservasi sebab intensitas pemanfaatan ruang yang rendah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengembangan daya tarik wisata Pelabuhan Buleleng dan sekitarnya tergolong sebagai kawasan potensial untuk dikembangkan.

Kabupaten Buleleng sebagai daerah pesisir mempunyai potensi pengembangan pariwisata bahari sebagai unggulan. Pengembangan wisata bahari tersebut dapat dipadukan dengan pengembangan Kota Tua yang menyimpan sejarah permulaan Ibu Kota Sunda Kecil.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada beberapa sub bidang yang terkait yaitu sub Bidang Kepariwisata, Penanaman Modal dan Penataan Ruang, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Sub Bidang Kepariwisata

Salah satu tujuan pengembangan pariwisata Kabupaten Buleleng adalah “menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai pintu gerbang kepariwisataan wilayah utara. Sasaran pengembangan kepariwisataan adalah (a) berkembangnya kawasan wisata terpadu sebagai andalan untuk menarik wisatawan ke Kabupaten Buleleng dan (b) meningkatnya investasi swasta di sektor pariwisata. Untuk memenuhi sasaran tersebut maka dinas pariwisata merumuskan indikasi program kegiatan antara lain: perencanaan daerah tujuan wisata Pelabuhan Buleleng. Kajian kerjasama pengembangan Kawasan, revisi rencana induk pariwisata Kabupaten Buleleng dan objek wisata dengan pihak swasta.

b) Sub Bidang Penanaman Modal

Salah satu sasaran sektor penanaman modal di Kabupaten Buleleng adalah menggali potensi sumber-sumber penerimaan modal daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk mencapai sasaran tersebut maka indikasi program yang akan dikaji lebih dalam adalah penggalian sumber-sumber penanaman modal yang baru, melakukan analisis penanaman modal daerah dan asing.

c) Sub Bidang Penataan Ruang

Kawasan wisata terpadu dan kawasan sepanjang pantai termasuk di antara lokasi sentra pengembangan wilayah.

4. Pembahasan

4.1. Gagasan Rencana Reklamasi Pelabuhan Buleleng

Sejak gagasan tentang reklamasi Pelabuhan Buleleng diungkap oleh pemerintah Kabupaten Buleleng, muncul beranekaragam persepsi kelompok masyarakat. Semua unsur stakeholders Kabupaten Buleleng memperoleh kesempatan untuk memahami konsep reklamasi yang sesuai dengan tipologi wilayah dan pantai.

4.1.1. Perencanaan Reklamasi Pelabuhan Buleleng

Gagasan reklamasi Pelabuhan Buleleng pada dasarnya merupakan respons pendayagunaan sebagian kawasan Pantai yang ada dalam RTRW Kabupaten Buleleng yang digolongkan sebagai kawasan Prioritas, sedangkan dalam konteks sistem pusat pengembangan, diskenariokan sebagai pusat kegiatan utama.

Sebagaimana asumsi perencanaan tata ruang kawasan pariwisata maka pembangunan reklamasi Pelabuhan Buleleng telah mempertimbangkan asumsi tersebut yaitu (a) perencanaan kawasan ini dilakukan oleh pemerintah daerah atau bersama-sama dengan pihak swasta, (b) pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan dilakukan dengan pendekatan PPP (*Public Participation Partnership*) oleh pihak swasta. Dalam hal ini hak pengelolaan atas tanah hasil reklamasi diterbitkan Pemerintah Pusat kepada pemerintah Kabupaten Buleleng, (c) pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan kawasan dilakukan pihak swasta bersama pemerintah kota, dan (d) pola atau system pengembangan kawasan dilakukan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan (*joint venture, share holder*) antara pemerintah dengan mitra swasta.

4.1.2. Perencanaan Proyek Pelabuhan Buleleng

Rencana pembangunan daya tarik wisata Pelabuhan Buleleng mengemukakan bahwa kebijakan memberikan kemudahan dibidang investasi mendapat respon yang cukup baik dari investor. Mengacu kepada kondisi Kabupaten Buleleng dan permasalahan daerah serta kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, maka harus dilakukan kajian dan perencanaan terpadu lagi, sehingga dapat diambil rencana pembangunan Pelabuhan Buleleng.

Maksud dan tujuan pembangunan Pelabuhan Buleleng pada intinya adalah:

1. Mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Buleleng sebagai pusat perekonomian dan pintu gerbang perdagangan penting di Indonesia Wilayah Bagian Timur.

2. Mempercepat pertumbuhan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana Kabupaten Buleleng.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng yang ditunjang sektor investasi swasta.

Sedangkan sasaran dari pada pembangunan Pelabuhan Buleleng adalah sebagai berikut ini:

1. Mewujudkan rencana pembangunan kawasan wisata terpadu dan terintegrasi.

Pemanfaatan ruang kawasan Pelabuhan Buleleng meliputi kegiatan jasa dan perdagangan (restoran, ruko, warung, toko cinderamata dan sebagainya) dan selanjutnya akan berfungsi sebagai fasilitas penunjang wisata.

2. Menjadikan Pelabuhan Buleleng sebagai salah satu *land mark* Kabupaten Buleleng sekaligus sebagai pintu gerbang dan tujuan wisata Wilayah Bali Utara.
3. Sebagai lokomotif pergereakan ekonomi riil serta memberikan *multiplayer effect* terhadap penyediaan lapangan kerja baru; pencerahan terhadap perkembangan industri rumah tangga seperti meningkatnya industri kerajinan, makanan khas serta berkembangnya sektor-sektor penunjang pariwisata dan perdagangan lainnya.
4. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Pada bagian ini telah diupayakan menelusuri Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana-rencana sektoral. Dapat dikatakan bahwa relatif besar kesenjangan (*gap*) antara rumusan kebijakan jangka panjang (*policy*) Penataan Pelabuhan Buleleng dengan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kabupaten Buleleng, demikian pula dengan indikasi program yang dimuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kemungkinan besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah menjabarkan RPJP dan/atau RPJM ke dokumen-dokumen spesifik yang berkesesuaian (*compatible*) dengan proyek pengembangan Pelabuhan Buleleng namun dalam kenyataannya dapat dilihat sampai sekarang ini proyek yang sebenarnya akan sangat berguna bagi peningkatan perekonomian masyarakat dan pemasukan devisa Negara dari nilai investasi yang cukup besar belum dapat diwujudkan. Hal ini mengakibatkan rencana yang ada belum mencapai sasaran yang diharapkan.

4.2. Permasalahan Lingkungan dan Perairan Laut

Masalah-masalah lingkungan utama yang dihadapi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Buleleng adalah;

1. Masalah pemanfaatan ruang
 - a. Perubahan tanah pertanian ke penggunaan tanah pemukiman kota
 - b. Pembangunan yang tidak sesuai ketentuan sempadan bangunan dan juga tidak sesuai dengan peruntukan tanah yang telah ditetapkan pemerintah.
 - c. Penggunaan tanah di kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Buleleng yang dapat mengganggu fungsi ekologis DAS tersebut sehingga berdampak pada kawasan pemukiman di hilirnya.
 - d. Batasan kepemilikan lahan yang masih banyak kurang jelas.
2. Abrasi Pantai
 - a. Gejala abrasi pantai yang telah berlangsung sejak lama dan mengakibatkan kerusakan pantai sehingga dapat mengancam pemukiman penduduk yang berdomisili di sekitar pantai, terutama pesisir pantai.
3. Degradasi ekosistem pantai
 - a. Degradasi ekosistem pesisir pantai, baik akibat pencemaran yang diangkut oleh berbagai sungai maupun akibat perusakan lingkungan,

terutama perusakan ekosistem mangrove, terumbu karang dan penggunaan potas untuk menangkap ikan.

4. Gempa dan tsunami
 - a. Gempa bumi dan tsunami, yang sesungguhnya merupakan gejala alam, tetapi karena berakibat pada kerugian harta benda, lingkungan dan nyawa menjadi masalah sosial yang harus dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan data dan fakta yang didapat dilapangan memberikan gambaran bawa penataan Daya Tarik Wisata Pelabuhan Buleleng perlu mendapat kajian yang lebih mendalam lagi dengan melibatkan semua unsur yang ada di dalam masyarakat, bukan hanya kehendak dari pemerintah Kabupaten Buleleng saja akan tetapi juga perlu memperhatikan aspirasi dari masyarakat dan mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan akibat pembangunan kawasan tersebut.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan sesungguhnya di dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan (RPJP) Kabupaten Buleleng telah dirumuskan bahwa optimasi pemanfaatan ruang kawasan pantai akan dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha.

Kebijakan tersebut belum dijabarkan ke bentuk rencana tata ruang yang lebih operasional dan rencana-rencana sector / rencana unsur kota yang berkesesuaian (*compatible*) dengan kebutuhan reklamasi pantai. Apabila kebijakan penataan dengan cara reklamasi dijabarkan ke tingkat rencana, tentu pada tingkat selanjutnya yakni di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) perlu dijabarkan rumusan tata ruang dan atau rencana sektor tersebut ke rumusan tingkat program. Bila rumusan program tahunan yang berkaitan dengan gagasan reklamasi tersebut disusun, tentu akan dapat mengetahui langkah-langkah

untuk mencegah dan atau menanggulangi gangguan reklamasi dan sekaligus langkah-langkah untuk mengembangkan manfaat yang diperoleh.

5.2. Saran

1. Mengintegrasikan rencana reklamasi pantai Pelabuhan Buleleng ke dalam rumusan kebijakan pembangunan kota dan pengembangan pantai baik dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat didalam proses perencanaan tata ruang bagian-bagian kota dan perencanaan sektor (misalnya zonasi pesisir pantai, rencana peningkatan kapasitas jalan, restorasi sungai dan lain-lai).
3. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan reklamasi pantai menyelenggarakan pendekatan dan kajian tematik untuk mendukung konsep penataan Pelabuhan Buleleng, termasuk pemutakhiran kajian zonasi wilayah Pesisir Pantai Pelabuhan Buleleng.
4. Masing-masing SKPD yang terkait dengan penataan pantai menjabarkan komponen-komponen rencana tata ruang reklamasi pantai Pelabuhan Buleleng ke rencana Teknik Ruang Kota Kawasan Pantai dan rencana Unsur Kawasan Pantai (sarana dan prasarana lingkungan).
5. Menyenggarakan diskusi terbatas yang bersifat focus (focus group discussion) secara berkala tentang pengembangan kawasan pantai bagi komunitas yang strategis, antara lain komunitas peneliti/dosen, guru SD hingga SLTA, pengelola jasa wisata, komunitas nelayan dan komunitas lain yang bersangkutan dan berkepentingan.
6. Mengintegrasikan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber yang terkait di dalam kerjasama antara SKPD yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, edisi kedua. Alih oleh Samodra Wibawa dkk. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Heru. 2001. *Negara Pasar dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riant, Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Ridwan. 2007. Implementasi kebijakan penataan pedagang Kaki Lima Jalan Urip Sumoharjo Kota Jogjakarta. *Tesis Program Studi Sosiologi, Pascasarsajana UGM*. Tidak dipublikasikan.
- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, cetakan pertama: Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Suradnya, I Made. *Analisis Faktor-faktor Daya Tarik Wisata Bali dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pariwisata Daerah Bali*. Bali: Sekolah Tinggi Pariwisata Bali.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Wahab, Solihin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Widodo, Djoko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Edisi Revisi. Jakarta: Media Pressindo.
- Zainudin. 2007. Budaya Politik dan Kebijakan Publik, (kasus penataan kawasan wisata Pantai Parang Tritis Jogjakarta. *Tesis Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial, Pascasarsana UGM*. Tidak dipublikasikan).